

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Program nuklir Korea Utara telah menimbulkan keresahan banyak pihak. Terutama Negara-negara adikuasa yang merasa terancam hegemoni pengaruhnya oleh peningkatan militer Korea Utara dalam hal kepemilikan persenjataan nuklir. Banyak pihak, terutama Amerika Serikat yang berupaya membujuk Korea Utara ataupun meminta Negara-negara disekitar Korea Utara seperti Korea Selatan, Cina, Jepang juga termasuk Indonesia agar berperan aktif untuk mencegah berlanjutnya program nuklir Korea Utara.

Upaya-upaya Korea Utara untuk menciptakan senjata nuklir membuat kawasan Asia Selatan, Amerika Serikat dan bahkan seluruh komunitas internasional menghadapi tantangan keamanan yang sangat serius. Pada tahun 2003 negara ini menjadi negara pertama yang keluar dari Pakta Non-Proliferasi (NPT). Upaya-upaya diplomasi dan pertemuan-pertemuan khusus merupakan alat utama untuk dapat bernegosiasi dengan Korea Utara, tapi keberhasilan yang didapat juga sangat sedikit. Pilihan kebijakan alternatifnya berupa isolasi dan pengurangan serta serangan militer.¹

Indonesia sebagai anggota tidak tetap keamanan Dewan Keamanan PBB diharapkan mampu menjalankan peranannya dalam pengambilan keputusan luar negerinya untuk masalah nuklir Korea Utara, sesuai pada prinsip-prinsip yang

¹ <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2056&l=5>

mendasari politik luar negeri RI. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengambil judul penelitian dengan tajuk ***“Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara Di Dewan Keamanan PBB”***

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk kurun waktu 2007-2008 tentunya diharapkan dapat memainkan peranannya secara efektif dalam menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional di DK PBB. Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut Indonesia dituntut untuk menyatakan sikapnya, dan sikap atau posisi Indonesia tersebut harus ditentukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari politik luar negeri RI dan juga perhitungan-perhitungan politis/strategis dalam dan luar negeri. Indonesia adalah Negara Pihak Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang selama ini secara konsisten memperjuangkan perlucutan senjata nuklir disamping perlucutan senjata pemusnah masal lainnya. Mengingat hal itu wajar kalau Indonesia berkepentingan agar perundingan tentang denuklirisasi Semenanjung Korea melalui Six-Party Talks dapat membawa hasil.²

Apabila Indonesia dapat memainkan peranannya secara optimal dalam memperjuangkan masalah pelucutan senjata nuklir Korea Utara maka keuntungan yang paling menonjol bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB adalah meningkatnya citra Indonesia dalam perpolitikan dan keamanan dunia. Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan jajaran

² Nugroho Wisnumurti. Seminar Nasional *“Memaknai Peran Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB”*, Jakarta, 30 Januari 2007

Deplu boleh berbangga bahwa penunjukan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB merupakan “cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia selama ini dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian baik pada tingkat kawasan maupun global.”

Di sisi lain, Indonesia dapat “memberikan warna” terhadap kerja Dewan Keamanan, termasuk dalam menentukan prioritas, pendekatan serta upaya reformasi kerja Dewan Keamanan. Itu mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu anggota yang mewakili kawasan Asia dan sekaligus wakil dari negara berkembang. Statusnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat menjadi lebih mudah menyampaikan kepentingan Indonesia ke sesama anggota, terutama mereka yang memiliki hak veto, dalam menyikapi masalah-masalah keamanan dunia yang selama ini menjadi perhatian utama Indonesia termasuk masalah nuklir di Korea Utara.³

Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama dan satu-satunya yang telah meratifikasi IAEA *Additional Protocol* pada tanggal 29 September 1999. *Additional Protocol* sebagai sebuah sistem *safeguards* yang kredibel diharapkan dapat menjadi elemen dari proses *confidence building measure* di dunia internasional, serta menjadi sebuah *early warning system* yang dapat diandalkan apabila terjadi penyalahgunaan (*misuse*) dari tenaga nuklir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara pihak untuk mendukung penghapusan berbagai program pengembangan senjata nuklir.

Dalam perlucutan senjata nuklir, Indonesia telah meratifikasi *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1979. NPT merupakan salah satu tonggak perlucutan senjata nuklir yang dinilai strategis dan berhasil dalam mengurangi perlombaan senjata nuklir. Lebih lanjut, NPT yang dilengkapi dengan mekanisme verifikasi IAEA juga menjadi rezim yang ampuh untuk memastikan kepatuhan negara pihak untuk melaksanakan kewajibannya.⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

Mengapa Indonesia tidak mendukung program nuklir Korea Utara?

D. Kerangka Dasar Pemikiran/Teori

Untuk memahami keputusan politik luar negeri suatu Negara cukup banyak teori yang membahasnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori atau kerangka dasar teori yaitu proses pengambilan keputusan politik luar negeri (William D. Coplin). Sebelum menguraikan teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan disampaikan apa yang disebut politik luar negeri, seperti yang diungkapkan oleh K.J Holsti, output dari kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan Negara lain.⁵

⁴ http://www.deplu.go.id/?category_id=84&news_id=1003&main_id=60.

⁵ V. J. Holsti (ed. M. Takin Anshari) editor, Herman Sinaga, *Politik Internasional : kerangka untuk*

Pembahasan politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional Negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada

1. Konsep Kepentingan Nasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

*Foreign policy is strategy or planed course of action developed by decision makers of a state or international entities aimed, at achieving specific goals defined in term of national interest.*⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa politik luar negeri suatu Negara adalah strategi atau serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu Negara terhadap Negara lain atau entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasionalnya. Dan seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang dapat melukiskan suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan dan kebijaksanaan yang aktual dan terencana yang ditujukan oleh suatu Negara. Meskipun tujuan politik suatu Negara yang satu dengan Negara yang lainnya berbeda, tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal yang disebut Jack C. Plano dan Roy Olton, yaitu:

*Self-preservation, dependence, territorial integrity, military security, and economic well-being.*⁷

⁶ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt Reinhart and Winston

Politik luar negeri adalah sikap dan komitmen suatu Negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya, dan itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa. Bagi para aktor pengambil keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor berpengaruh terhadap formulasi kebijaksanaan politik luar negerinya. Kepentingan suatu Negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya.⁸ Lebih sederhana lagi politik luar negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan yang disertai rentetan tindakan yang rumit tapi dinamis, dan ditempuh oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut dalam organisasi-organisasi baik secara bilateral atau multilateral.⁹

Pelaksanaan politik luar negeri oleh suatu negara adalah suatu petunjuk yang menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Dengan melaksanakan politik luar negerinya, maka suatu bangsa atau Negara mendudukan diri dalam pergaulan antar bangsa atau Negara dan sekaligus menentukan sikap, posisi dan perannya dalam dinamika pergaulan internasional.

Karena situasi internasional itu tidak statis melainkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan perkembangan, maka kebijaksanaan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selalu memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut.

⁷ *Ibid.* hal. 128.

⁸ *Ibid.* hal. 391

⁹ Suni Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Djakarta, Amia, 1980

Kadang-kadang penyesuaian-penyesuaian tersebut bisa disiapkan karena perubahan-perubahan tertentu bisa diantisipasi, akan tetapi juga mungkin terjadi perubahan-perubahan tertentu yang cepat dalam dinamika internasional, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang cepat pula terhadap situasi yang baru timbul. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tentunya tidak dilakukan atas dasar oportunisme belaka, tidak juga dilakukan dengan sekedar harus ikut (passivisme), penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan sebagai prakarsa aktif.

Untuk menjamin agar penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat dilakukan dan terjaga dari penyimpangan-penyimpangan prinsipil, maka ditetapkanlah patokan-patokan yang tetap dalam batas-batas mana berbagai penyesuaian dapat dilakukan. Dengan demikian maka apapun penyesuaian yang dilakukan, pelaksanaan politik luar negeri tetap memiliki kesadaran arah (sense of direction).

Dua unsur konstan yang penting dan berlaku sebagai patokan pelaksanaan politik luar negeri ialah:

- a) Ideologi dan falsafah Negara, susila kehidupan kebangsaan yang tercantum dalam pancasila seharusnya bukan saja merupakan naungan ideology bagi pelaksanaan politik luar negeri kita, melainkan harus juga dimanifestasikan dalam perilaku kita terhadap pergaulan internasional.
- b) Konstitusional, sikap yang mendasari politik luar negeri kita harus merupakan manifestasi dari apa yang terjabar dalam UUD 1945.

Kedua unsur konstan tersebut merupakan ciri ideal dari politik luar negeri Republik Indonesia dan pengembangannya harus menjadi cita Indonesia

dalam pergaulan internasional. Citra tersebut tentunya akan lebih dimantapkan sejauh kita secara konsisten dan konsekuen berpegang pada asas-asas yang konstan tersebut. Maka politik luar negeri yang kita selenggarakan haruslah dibangun dan dikembangkan termasuk keharusannya untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika internasional atas dasar-dasar yang kokoh berupa wawasan ideology dan konstitusional, dasar-dasar konstan ini pula yang harus dijadikan pedoman dalam segala ikhtiar untuk mendapatkan suatu kesepakatan (konsensus) nasional kita dalam menangani masalah-masalah luar negeri dan hubungan internasional umumnya.

Dalam mengelola masalah-masalah internasional, kita mendapati kenyataan-kenyataan yang tidak selalu memungkinkan ciri ideal berjalan selaras dengan ciri riil. Dinamika internasional seringkali menempatkan kita dalam realitas yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan dambakan. Bahkan bagaimanapun juga tidak mungkin kita ingkari, bahwa hubungan internasional bukan saja ditandai oleh adanya kepentingan yang sama, melainkan juga oleh kepentingan bertentangan.

Dengan mempertimbangkan kenyataan kita saat ini, maka ketetapan MPR secara tegas menggariskan adanya urutan prioritas, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di

2. Meneruskan usaha-usaha memantapkan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.
3. Meningkatkan peranan regional peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa.
4. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara Negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
5. Meningkatkan kerjasama antar Negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Demikianlah beberapa batasan konsepsional tentang kebijaksanaan dan pelaksanaan politik luar negeri kita yang perlu sama-sama kita jadikan pedoman untuk melakukan telaah tentang situasi internasional dan dinamikanya, khususnya dimana kita mempunyai keterlibatan langsung atau tidak langsung.

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja cabinet, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2005 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis balik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses

pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (*concentric circles*) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah

ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indonesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan *partner* utama ekonomi Indonesia. Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerja sama dengan *like-minded developing countries*. Itulah yang menyebabkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan *Non-Aligned Movement (NAM)*, *the Organization of the Islamic Conference (OIC)*, *the Group of 77 (G-77)* dan *the Group of 15 (G-15)*. Dengan forum-forum tersebut Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Sementara itu, pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak segala keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB.

Penerapan politik luar negeri bebas - aktif tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Polugri Indonesia didesain untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri perlunya polugri yang luwes dan *flexible* untuk menghadapi segala tantangan dimaksud. Perubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu

dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang berupa *non-state actors*.¹⁰

Untuk menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam hubungan internasional, diperlukan teori yang relevan. Karena teori adalah bentuk penyelesaian paling umum yang memberitahu mengapa semua terjadi, dan kapan sesuatu bisa diduga terjadi. Jadi, selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi, ilmuwan menggunakan konsep untuk mengorganisasikan dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian mereka. Teori menggabungkan serangkaian konsep atau menjadi suatu penjelasan yang ditunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan.¹¹ Kerangka penelitian membantu dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan memilih konsep-konsep yang tepat, guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa teori itu bukanlah suatu pengetahuan yang sudah pasti tetapi haruslah dianggap sebagai petunjuk hipotesa.¹² Kerangka dasar teori juga memudahkan untuk menganalisa masalah yang dihadapi. Untuk menganalisa serta mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi, penulis melakukan penekanan pada kebijakan luar negeri suatu Negara.

Dalam mencoba menganalisa pengambilan keputusan luar negeri Indonesia terhadap program nuklir Korea Utara pasca uji coba nuklir tanggal 9, Oktober 2003 dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan :

¹⁰ http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1081

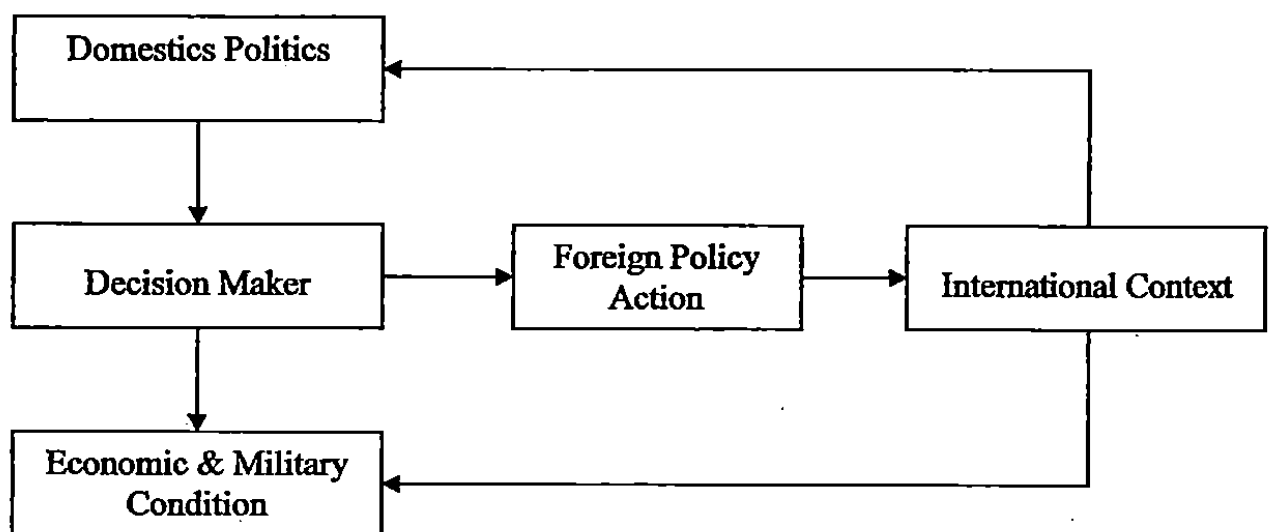
¹¹ Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasioanal : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 185.

¹² Melly G. Tan, *Metodologi Penelitian Survei*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 37

2. Teori pengambilan keputusan luar negeri

Menurut William D. Coplin,¹³ *decision making* digambarkan sebagai berikut:

Gambar. I . 1 .



Para pembuat keputusan luar negeri dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikategorikan dalam:

1. Situasi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik.
2. Kemampuan ekonomi dan militer, domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan keamanan.
3. Konteks internasional (situasi di negara dimana politik luar negeri ditujukan, serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang terjadi).

Dalam teori pembuatan kebijakan luar negeri dari William D. Coplin bila kita lihat dari segi negara Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negeri.

Pertama, situasi politik domestik, Kepentingan nasional sebagai kebijakan pemerintah yang diyakini dan dilaksanakan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara agar dapat bertahan, berkembang dan tumbuh terus dalam percaturan internasional Pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2006 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009), yang diabdikan bagi kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (*concentric circles*).

Kedua, situasi ekonomi dan militer domestic, dimana Indonesia juga berkepentingan dalam perundingan tentang denuklirisasi Semenanjung Korea melalui Six-Party Talks. Karena masalah nuklir di Semenanjung Korea ini mempunyai dampak pada stabilitas dan keamanan kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara khususnya. Yang merupakan ancaman bagi Negara Indonesia sebagai Negara yang berada di kawasan Asia yang akan mengalami dampak pada stabilitas keamanan serta ekonomi. Sehingga hal diatas yang menjadi faktor Indonesia mendasari pertimbangan pertahanan keamanan

Dari kedua faktor tersebut situasi politik dalam negeri dan situasi ekonomi serta militer mempengaruhi pembuatan keputusan sehingga menimbulkan sikap politik luar negeri. Sehingga konteks internasional muncul.

Ketiga, konteks internasional ini pengaruh dari negara-negara lain atau konsentrasi Internasional dimana hal itu adalah sebuah produk politik luar negeri Indonesia dari suatu Negara dan kemungkinan kedepan atau sebagai pertahanan yang mempengaruhi adanya situasi politik maupun ekonomi militer, yang mewujudkan pembuatan keputusan sehingga terjadi politik luar negeri. Dalam konteks kasus ini, situasi yang berkembang di tengah kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara adalah gencarnya desakan-desakan pihak internasional, terutama Amerika Serikat, agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya serta meminta peran aktif negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia sebagai anggota dewan tidak tetap keamanan PBB yang memiliki potensi untuk membujuk Korea Utara.

E. Hipotesa

karena Uji coba nuklir Korea Utara mengancam stabilitas dan keamanan Kawasan Asia Timur.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman, penulisan skripsi ini di batasi lingkup waktu tahun 2003 sampai dengan 2006. Data yang diperoleh diluar lingkup waktu tersebut sebagai data pelengkap dalam penulisan skripsi ini

G. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini menerapkan fakta dari peristiwa yang berlangsung dalam upaya politik luar negeri Indonesia terhadap masalah nuklir Korea Utara pasca uji coba nuklir tgl, 9 Oktober tahun 2003 secara sederhana metode penelitian menggunakan analisa data sekunder.

Analisa data sekunder mengandung pengertian penulis tidak terlibat secara langsung akan tetapi melalui proses penelitian dari data-data yang telah tersedia.¹⁴ adapun data-data dalam skripsi ini diperoleh melalui majalah, Koran, buku-buku kajian kuliah, media internet dan sumber-sumber lain sebagai rujukan, yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

H. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi/penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan Politik luar negeri Indonesia
- Untuk mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesia
- Untuk mengetahui apakah Indonesia memiliki peranan sebagai anggota tidak tetap DK PBB dalam menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional di DK PBB.
- Untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesa dengan kerangka teori berdasarkan data dan fakta yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang berjudul ***“Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara Di Dewan Keamanan PBB”*** disusun secara sistematis menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I :Bab ini merupakan bab pendahuluan, yaitu menjelaskan secara umum dari isi skripsi. Bagian ini meliputi : alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, jangkauan penelitian, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II :Bab ini tentang dinamika politik luar negeri Indonesia yang meliputi dasar-dasar politik luar negeri Indonesia dan Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional serta Keanggotaan RI di DK PBB

BAB III :Bab ini menjelaskan tentang program nuklir Korea Utara yang meliputi isu nuklir Korea Utara dan peranan serta upaya Indonesia sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam menangani masalah nuklir Korea Utara.

BAB IV :Bab ini menjelaskan faktor-faktor Indonesia tidak mendukung program nuklir Korea Utara meliputi doktrin pertahanan-keamanan (Korea Utara, China, dan Jepang) yang meliputi ancaman stabilitas - keamanan kawasan Asia Timur dan kondisi politik dalam negeri yang meliputi kebijakan dan kondisi Politik Dalam Negeri RI serta Kebijakan Amerika Serikat Terhadap

**Proliferasi Nuklir Di kawasan Asia dan Upaya Amerika Serikat
Untuk Menghambat Program Nuklir Korea Utara.**

**BAB VI :Penutup, yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang
menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan
kinerja serta kemampuan dan keterampilan yang**